



ISSN 1411 - 5972

JURNAL TEKNOLOGI

FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS PAKUAN

Volume 1, Edisi 7, Periode Januari 2006

- Pengaruh Penambahan Serat Ijuk Terhadap Kinerja Beton (Titik Penta Artiningsih)
- Genesa dan Evolusi Kimia Air Panas Mataair Panas Pada Akifer Batuan Intrusif di Jawa Barat (Bambang Sunarwan, Henri Silaen, dan Abdurrachman Assegaf)
- Partisipasi Masyarakat Kampung Kota Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah (Indarti Komala Dewi Somaatmadja dan Woro Indriyati Rahmani)
- Kebijakan Strategis Mengatasi Permasalahan Transportasi Perkotaan (Budi Arief)
- Kajian Penggunaan Titik Kontrol Minor Pada Proses Rektifikasi Foto Udara Format Kecil (Menggunakan Software Er Mapper 5.5) (Ronim Panday dan Alia Saskia Puspitasari)
- Cost Path Analysis Dengan Menggunakan Perangkat Lunak Arc View (Marlis Yunanto, MA. Karmadi dan Rudje RA)

PARTISIPASI MASYARAKAT KAMPUNG KOTA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh :

Indarti Komala Dewi Somaatmadja dan Woro Indriyati Rahmani

Abstrak

Kampung kota merupakan salah satu pilihan permukiman penduduk kota berpenghasilan rendah yang potensial. Sebagai tempat bermukim, kampung kota yang padat penduduk, umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang dan kondisinya tidak memadai. Hal tersebut mengakibatkan kampung kota mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup.

Sejalan dengan UU no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebijakan otonomi daerah melalui UU no 22 tahun 1999, maka diharapkan terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui partisipasi masyarakat yang kuat. Kondisi tersebut dimaksudkan agar masyarakat kampung kota, sebagai kelompok termotivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah dan mengusahakan keberhasilan peningkatan kualitas lingkungan hidup kampungnya.

Untuk itu pemerintah daerah harus siap untuk memfasilitasi dan mendorong proses pemberdayaan masyarakat kampung kota.

Kata Kunci : *partisipasi, kampung kota, lingkungan hidup*

1. PENDAHULUAN

Kepesatan proses urbanisasi yang tidak diimbangi penanganan masalah pemukiman, akan dapat mengakibatkan berkembangnya kampung-kampung padat penduduk di perkotaan.

Kondisi kampung kota yang padat penduduk dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, akan menjadikan kota mengalami masalah penurunan kualitas lingkungan hidup.

Kampung kota merupakan tempat permukiman penduduk di perkotaan yang bercirikan kehidupan masyarakat desa. Biasanya mempunyai fungsi yang cukup penting, yaitu merupakan "jembatan penyeberangan" dari kehidupan pertanian di desa menjadi kehidupan ekonomi perkotaan (Horton dan Hunt, 1992). Selain itu kampung kota merupakan salah satu alternatif permukiman penduduk kota berpenghasilan terbatas yang potensial, sebab mampu menampung (60 - 70) % penduduk kota (Silas, 1983,).

Salah satu penentu penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kampung kota adalah partisipasi masyarakatnya, baik sebagai individu maupun kelompok. Hal tersebut disebabkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, masyarakat harus berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan agar anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah dan mengusahakan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan UU no 22/1999 tentang otonomi daerah pada intinya mengisyaratkan bahwa,

otonomi daerah pada pelaksanaannya akan bertumpu pada proses perubahan dan penguatan masyarakat, sebagai pelaku utama pembangunan. Selain itu, otonomi daerah menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam memfasilitasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Dengan demikian pembangunan di era otonomi daerah membutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup kampung kota, maka momentum otonomi daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakatnya.

Sehubungan dengan penguatan aspek partisipasi masyarakat dalam era otonomi daerah, maka ada dua pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama bagaimana tingkat partisipasi masyarakat kampung kota yang terjadi di era sebelum otonomi daerah. Ke dua, tingkat partisipasi seperti apa yang diharapkan di era setelah otonomi daerah.

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Menelaah tingkat partisipasi yang dilakukan masyarakat kampung kota dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya, sebelum otonomi daerah
- b. Menelaah konsep peningkatan partisipasi masyarakat kampung kota di era otonomi daerah.

2. PEMAHAMAN TENTANG PARTISIPASI

Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai ikut ambil bagian atau memiliki keterlibatan aktif masyarakat dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan usaha perbaikan lingkungan hidup. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (UU no 23/1997 tentang Lingkungan Hidup).

Pada pasal 7, disebutkan pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;

- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran pendapat;
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Sedangkan pada pasal 9, disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang. Artinya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup harus diiringi dengan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Kebijakan penataan ruang harus melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat dimengerti dan sesuai aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang, karena partisipasi masyarakat dapat merupakan "alat" untuk meminimalkan konflik yang mungkin terjadi, baik antara perencana dengan pemerintah, perencana dengan masyarakat, maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Diabaikannya partisipasi masyarakat akan menyebabkan tidak terjaminnya manfaat hasil perbaikan lingkungan hidup. Banyak kasus yang memperlihatkan program perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup kampung kota yang bersifat top down, tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tidak terpelihara atau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat tidak terbatas hanya pada tahap ikut melaksanakan saja, tetapi ikut serta dalam berbagai tahap partisipasi. Beberapa tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah (Castillo, 1983, Tjokroamidjojo, 1977; Zamor, 1985) :

- a. Tahap pemanfaatan hasil
- b. Tahap pelaksanaan
- c. Tahap pengawasan dan penilaian
- d. Tahap perencanaan dan pengambilan keputusan

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, maka perlu ada upaya agar masyarakat dilibatkan langsung dalam seluruh tahap partisipasi. Semakin lengkap tahap partisipasi yang dilakukan masyarakat, maka akan semakin berhasil program peningkatan kualitas lingkungan hidup. Hal ini seperti dinyatakan oleh Castillo (1983),

bahwa proyek kemasyarakatan menjadi lebih terpelihara dan lebih murah dari segi biaya, jika masyarakat telah berpartisipasi dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat dikatakan tingkat partisipasi rendah apabila masyarakat hanya terlibat dalam tahap pemanfaatan hasil dan pelaksanaan. Sedangkan tingkat partisipasi dikatakan tinggi apabila masyarakat sudah terlibat dalam seluruh tahap partisipasi.

3. PARTISIPASI MASYARAKAT KAMPUNG KOTA DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.

Hasil penelitian di beberapa kampung kota di Kota Bogor tahun 1995 dan 2000, menunjukkan masih terdapat masyarakat kampung kota yang berpartisipasi hanya pada tahap pemanfaatan hasil saja. Selain itu, sebagian besar (59% - 60%) berpartisipasi pada tahap pemanfaatan hasil dan pelaksanaan saja. Walaupun pada tahun 2000 terjadi sedikit peningkatan partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan. Yaitu dari 14 % menjadi 21 %. Akan tetapi masyarakat yang berpartisipasi dalam semua tahapan, masih tetap rendah yaitu antara 2% - 7 %. Keadaan ini memperlihatkan tahap partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat yang paling rendah, yaitu :

- a. Masyarakat hanya memanfaatkan hasil pembangunan/perbaikan tanpa ikut terlibat aktif dalam proses nya, atau
- b. Masyarakat selain hanya memanfaatkan hasil, mereka juga mulai terlibat dalam pelaksanaan pembangunan/perbaikan kualitas lingkungan hidupnya. Selanjutnya lihat Tabel 1.

Tabel 1. Tahap Partisipasi Masyarakat di Beberapa Kampung di Kota Bogor

Tahap Partisipasi	1995 (%) [*]	2000 (%) ^{**}
1. Pemanfaatan hasil	18,33	18,23
2. Pemanfaatan hasil dan pelaksanaan	60,83	59,38
3. Pemanfaatan hasil, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan	14,17	20,84
4. Pemanfaatan hasil, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, perencanaan dan pengambilan keputusan	6,67	1,56

Sumber: *) Somaatmadja, IKD (2000)

**) Afriyadi, (2001).

Rendahnya tahap partisipasi masyarakat ini dapat disebabkan oleh :

- a. Peranan pemerintah yang lebih dominan dibandingkan masyarakat. Proyek perbaikan kualitas lingkungan hidup selama ini banyak yang bersifat "top down" (ditentukan dari atas), menjadikan masyarakat hanya sebagai objek pembangunan. Masyarakat dilibatkan hanya sebagai pelaksana dalam menjalankan program-program pemerintah. Akibatnya masyarakat kurang mendapat kesempatan yang luas untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai tahap, terutama tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengalaman perbaikan kualitas lingkungan kampung kota pada awal Pelita I, melalui Program Perbaikan Kampung Muhammad Husni Thamrin di Jakarta dan W.R. Supratman di Surabaya, yang mensyaratkan adanya dana swadaya masyarakat sebesar 60 % dari total dana, pada saat itu partisipasi masyarakat kampung tidak terbatas pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil saja, tetapi juga pada tahap perencanaan dan penilaian serta pengawasan (Karamoy, 1984). Program perbaikan kampung tersebut dianggap berhasil membangkitkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kampungnya. Akan tetapi pada pelita selanjutnya, peranan pemerintah pada program perbaikan kualitas lingkungan kampung kota dari segi pendanaan semakin besar, bahkan seluruh dana perbaikan kampung ditanggung pemerintah (Herlianto, 1981). Peranan pemerintah pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, tahap pengawasan dan penilaian, serta pada tahap pelaksanaan semakin dominan. Kampung-kampung yang akan diperbaiki ditentukan oleh pemerintah, masyarakat penghuni kampung tidak dilibatkan lagi dalam proses perbaikan kampungnya (Herlianto, 1981 dan Karamoy, 1984). Hal tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi pasif, terlihat dari kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pemeliharaan prasarana dan fasilitas kampung yang telah dibangun pemerintah. Demikian pula program perbaikan kampung kota melalui Proyek Perintah Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota (P3LPK), atau melalui Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) di era dasawarsa 1980-2000 kurang banyak

tisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan.

Wadah untuk berpartisipasi dapat memanfaatkan institusi kemasyarakatan yang ada di tingkat Rukun Warga (RW) atau kelurahan yang berbasis komunitas. Di DKI Jakarta institusi kemasyarakatan ini disebut sebagai Dewan Kelurahan. Peran secara aktif Dewan Kelurahan DKI Jakarta ini dilaksanakan mulai tahun 2002. Dewan kelurahan ini menyalurkan aspirasi masyarakat di tingkat RW. Aspirasi masyarakat tingkat RW ini berasal dari aspirasi masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT). Dewan Kelurahan selain berperan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya kepada pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya, juga berkewajiban menyampaikan program-program pemerintah yang akan diberlakukan kepada masyarakat yang diwakilinya.

Pemilihan wakil masyarakat di Dewan kelurahan mengikuti mekanisme sebagai berikut (Gambar 1)



Gambar 1. Proses Pembentukan Dewan Kelurahan

Mengingat posisi strategis dewan kelurahan, dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi, maka pemilihan anggotanya memerlukan kriteria jelas. Kriteria itu misalnya berpendidikan, mempunyai keahlian, mempunyai komitmen terhadap proses pembangunan kampungnya, serta disegani karena dianggap mumpuni, bertanggung jawab, bijaksana, dan jujur oleh sebagian anggota masyarakatnya

Upaya meningkatkan partisipasi dan kekaligus mendorong keswadayaan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk peningkatan kualitas lingkungan hidup kampung kota, tidaklah sederhana, memerlukan "penggerak" atau "agen pembangunan" (Syarwani, 1992).

Akan halnya masyarakat kampung kota pada umumnya berpendidikan rendah, maka agen pembangunan akan diperlukan dalam hal advocacy dan pendampingan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Untuk itu perlu diberikan kesempatan pada lembaga kemasyarakatan (dari luar kampung kota) yang bergerak di bidang pengembangan swadaya masyarakat, untuk turut serta sebagai "agen pembangunan."

Dengan demikian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kampung kota pada tahap awal, selain dibentuknya Dewan Kelurahan, maka diperlukan pula adanya bantuan dari "agen pembangunan".

Peran agen pembangunan tersebut adalah :

- Sebagai katalisator, menggerakkan dan menyadarkan masyarakat agar mau melakukan perubahan menuju situasi yang lebih baik, melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahap partisipasi.
- Sebagai pembantu masyarakat dalam proses : diagnosa permasalahan, merumuskan kebutuhan, menentukan tujuan, memilih dan menciptakan pemecahan masalah, mengambil keputusan dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah.
- Membantu dewan kelurahan menyampaikan program-program pemerintah, agar supaya program tersebut dapat lebih dimengerti dan diyakini manfaatnya oleh masyarakat.

Agen pembangunan sebagai orang yang berasal dari luar masyarakat kampung kota, (outsider) mungkin akan mengalami hambatan kultural dan struktural. Langkah pertama untuk menembus hambatan tersebut adalah mendalami arti penting kata-kata "dari rakyat dan untuk rakyat", pengabaian arti kata "dari rakyat" akan membelokan pola kegiatan dan dapat menghasilkan sesuatu yang sama sekali bukan untuk rakyat (Syarwani, 1992). Untuk itu "agen pembangunan" harus dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang akan dibantu. Hubungan ini mengandung makna saling percaya, kejujuran dan empati. Agen pembangunan harus dapat menempatkan dirinya pada kedudukan masyarakat kampung yang hendak dibantunya, supaya tidak terjadi bias dalam pemikiran dan tindakannya. Dalam kegiatan pemberdayaan ini, "agen pembangunan" hendaknya selalu melibatkan masyarakat kampung kota semaksimal mungkin dalam setiap tahap partisipasi dan melatih mereka agar mampu

bertindak sebagai agen perubahan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya setelah masyarakat kampung mampu menjadi agen pembangunan bagi dirinya sendiri, tugas "agen pembangunan" (outsider), dapat dikatakan selesai. Untuk selanjutnya masyarakat kampung kota dapat membentuk semacam forum warga. Forum Warga merupakan institusi kemasyarakatan yang berasal dari komunitas kampung (grass root communities)

Secara diagramatik peran Dewan Kelurahan dan "Agen Pembangunan" dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kampung kota, dapat dilihat pada (Gambar 2.)



Gambar 2. Peranan Dewan Kelurahan dan Agen Pembangunan / Forum Warga

5. PENUTUP

Kampung kota, sebagai bagian integral dari pembangunan kawasan perkotaan, merupakan alternatif tempat hunian penduduk kota berpenghasilan terbatas yang potensial, sebab mampu menampung (60 - 70) % penduduk kota. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya, peningkatan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap mutlak dibutuhkan.

Di era otonomi daerah peluang untuk penguatan dan peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan semakin bertambah besar. Untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasinya, masyarakat kampung kota dapat melakukannya melalui Dewan Kelurahan. Pada tahap awal untuk memberdayakan dan mendampingi masyarakat

kampung kota Dewan Kelurahan dapat dibantu oleh "Agen Pembangunan". Melalui pendekatan pemberdayaan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat kampung kota, khususnya dalam hal peningkatan kualitas lingkungan hidupnya.

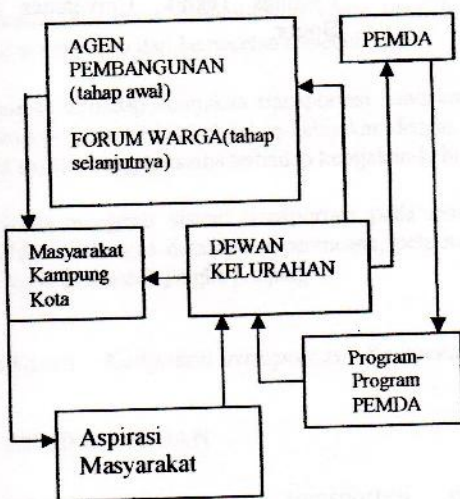
Selanjutnya, dimasa datang, diharapkan terjadi peningkatan keberhasilan dan keberlanjutan peningkatan kualitas lingkungan hidup kampung kota, yang akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bianpoen, 1979 *Perkampungan Kota: Kasus Jakarta*, Widyapura No 5 Tahun ke II, Jurnal Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta.
- Castillo, G.T, 1983, *How Participatory, Is Participatory Development a Review of The Philippines Experience*, Philippine Institute for Development Studies
- Herlianto, A, 1981, *Perbaikan Kampung Perlu Ditangani Semua Pihak*, dalam E Budihardjo (editor), 1992 *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Penerbit Alumni.
- Horton, B. dan C.L. Hunt, 1992, *Sosiologi*, Edisi 6, Penerbit Erlangga
- Karamoy, A, 1984, *Program Perbaikan Kampung : Harapan dan Kenyataan*, Prisma No 6 Tahun XIII
- Koswara, M. dan J. Judd, 1979, *Community Health Development Programme in the Framework of the Kampung Improvement Programme*, Pengembangan Area no 7, tahun ke 4, Jurnal, Department of Public Works Directorate General of Housing Planning and Urban Development, Directorate of City and Regional Planning, in Cooperation with United Nations Children's Funds.
- Salim, E., 1979, *Perkampungan Kota dan Lingkungan*, Widyapura No 5 tahun ke II Jurnal Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta.
- Silas, J., 1983, *Beberapa Pemikiran Dasar Tentang Perumahan dan Perkampungan di Indonesia*, dalam E. Budihardjo (editor), 1992, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Penerbit Alumni
- Somaatmadja, IKD, 2000, *Profil Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan Hidup di Kampung Bubulak dan Lebak Pasar Kota Bogor*, Jurnal Teknologi Fakultas Teknik

bertindak sebagai agen perubahan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya setelah masyarakat kampung mampu menjadi agen pembangunan bagi dirinya sendiri, tugas "agen pembangunan" "(outsider), dapat dikatakan selesai. Untuk selanjutnya masyarakat kampung kota dapat membentuk semacam forum warga. Forum Warga merupakan institusi kemasyarakatan yang berasal dari komunitas kampung (grass root communities)

Secara diagramatik peran Dewan Kelurahan dan "Agen Pembangunan" dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kampung kota, dapat dilihat pada (Gambar 2.)



Gambar 2. Peranan Dewan Kelurahan dan Agen Pembangunan / Forum Warga

5. PENUTUP

Kampung kota, sebagai bagian integral dari pembangunan kawasan perkotaan, merupakan alternatif tempat hunian penduduk kota berpenghasilan terbatas yang potensial, sebab mampu menampung (60 - 70) % penduduk kota. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya, peningkatan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap mutlak dibutuhkan.

Di era otonomi daerah peluang untuk penguatan dan peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan semakin bertambah besar. Untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasinya, masyarakat kampung kota dapat melakukannya melalui Dewan Kelurahan. Pada tahap awal untuk memberdayakan dan mendampingi masyarakat

kampung kota Dewan Kelurahan dapat dibantu oleh "Agen Pembangunan". Melalui pendekatan pemberdayaan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat kampung kota, khususnya dalam hal peningkatan kualitas lingkungan hidupnya.

Selanjutnya, dimasa datang, diharapkan terjadi peningkatan keberhasilan dan keberlanjutan peningkatan kualitas lingkungan hidup kampung kota, yang akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bianpoen, 1979 *Perkampungan Kota: Kasus Jakarta*, Widyapura No 5 Tahun ke II, Jurnal Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta.
- Castillo, G.T, 1983, *How Participatory, Is Participatory Development a Review of The Philippines Experience*, Philippine Institute for Development Studies
- Herlianto, A, 1981, *Perbaikan Kampung Perlu Ditangani Semua Pihak*, dalam E Budihardjo (editor), 1992 *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Penerbit Alumni.
- Horton, B. dan C.L. Hunt, 1992, *Sosiologi*, Edisi 6, Penerbit Erlangga
- Karamoy, A, 1984, *Program Perbaikan Kampung : Harapan dan Kenyataan*, Prisma No 6 Tahun XIII
- Koswara, M. dan J. Judd, 1979, *Community Health Development Programme in the Framework of the Kampung Improvement Programme*, Pengembangan Area no 7, tahun ke 4, Jurnal, Department of Public Works Directorate General of Housing Planning and Urban Development, Directorate of City and Regional Planning, in Cooperation with United Nations Children's Funds.
- Salim, E., 1979, *Perkampungan Kota dan Lingkungan*, Widyapura No 5 tahun ke II Jurnal Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta.
- Silas, J., 1983, *Beberapa Pemikiran Dasar Tentang Perumahan dan Perkampungan di Indonesia*, dalam E. Budihardjo (editor), 1992, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Penerbit Alumni
- Somaatmadja, IKD, 2000, *Profil Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan Hidup di Kampung Bubulak dan Lebak Pasar Kota Bogor*, Jurnal Teknologi Fakultas Teknik

Uninersitas Pakuan, Vol I, No 1, Agustus 2000

Syarwani, A, 1992, *LSM, Partisipasi Masyarakat dan Usaha Menumbuhkan Keswadayaan, Pengembangan Swadaya Nasional Tinjauan Ke Arah Persepsi yang Utuh*, LP3ES.

Tasmaya R., 2002, *Perencanaan Pembangunan Dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi DKI Jakarta*, Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Bagi Penanggulangan Kemiskinan : Sebuah Tantangan Dalam Pembangunan Wilayah dan Kota, ITB - SOCSEA - BAPPENAS.

Tjokroamodjojo, B, 1977, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.

Zamor, J.G.C, (editor), 1983, *Public Participation in Development Planning and Management, Case from Africa and Asia*, Replica Edition, West View Press Boulder and London.

RIWAYAT PENULIS

Ir. Indarti Komala Dewi Somaatmadja MSI, pengajar pada program studi Teknik Planologi Fakultas Teknik, Universitas Pakuan Bogor.

Ir Woro Indriyati Rachmani MT., Pengajar pada program studi Teknik Planologi, Fakultas Teknik, Universitas Pakuan Bogor.

